

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MISKIN DALAM
MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK DI ERA PANDEMI *COVID-19***



Diajukan oleh :

Juan Heradji Hugo

NPM	170512855
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MISKIN DALAM
MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK DI ERA PANDEMI *COVID-19***



Diajukan oleh :

Juan Heradji Hugo

NPM	170512855
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MISKIN DALAM
MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK DI ERA PANDEMI *COVID-19***



**Diajukan oleh :
Juan Heradji Hugo**

NPM	170512855
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

26-11-2020

Dr. J. Widijantoro, S.H.,M.H

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MISKIN DALAM
MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK DI ERA PANDEMI *COVID-19***



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **21 Desember 2020**
Tempat : **Video Conference**

Susunan Tim Penguji

Ketua : **Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**
Sekretaris : **Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.**
Anggota : **Dr. J. Widiyantoro, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku
(Filipi 4:13)*

*Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
(albert Einstein)*

Faith is trusting God even when you don't understand His plan



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MISKIN DALAM MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK DI ERA PANDEMI *COVID-19*”**”.

Penulisan Hukum ini merupakan kewajiban sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.

Didalam kesempatan yang diberikan, penulisan ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. J. Widiyantoro, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan tekun membimbing penulis untuk menyelesaikan program Strata-1 (satu) Studi Ilmu Hukum dengan program kekhususan Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dengan segala hormat, dalam penulisan penulis masih banyak menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lainnya, skripsi ini tidak akan terselesaikan, Oleh karena itu penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta yang telah mengesahkan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta baik dalam bimbingan maupun dalam kegiatan belajar mengajar
3. Alm. Bapak Simpei Hugo, Ibu Marlina yang tercinta, Terimakasih atas bimbingan dan Kasih Sayang, dan pengorbanan , serta doa-doa yang selalu

dipanjatkan kepada Tuhan Yesus terkhusus lagi untuk papah terimakasih atas bimbingan, semangat, dan motivasi bapak selama bapak hidup untuk menyemangati anakmu.

4. Caroline Constant Carl yang tercinta, terimakasih atas dukungan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan
5. Terimakasih kepada bapak-bapak jaga parkir yang menemani di kala tidak ada teman.
6. Terimakasih juga kepada Keluarga besar yang turut mendukung dalam penulisan hukum ini sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini
7. Terimakasih kepada seluruh teman-teman di masa kehidupan kampus saya antara lain : Gregorius Haposan, Arya Bramantya, Alfa Andreas, Jessica Papilaya, Anna Lavidia, Dita Amanda, Hendy Geraldo, Stephanie Br. Situmorang, Anelia Meilani, Aldo, Gregorius unggul, Romykam, Philipo Apriando, Sedulur Gags, Sedulur Lombroso, kawan-kawan BEM, LBM yang telah selalu menemani dalam kehidupan perkuliahan
8. Terimakasih kepada semua pihak dan rekan – rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Terimakasih untuk seluruh doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis,
9. Terimakasih juga kepada almamater saya Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah banyak memberikan tempaan, proses pendidikan, dan belajar mengenai banyak hal sehingga saya dapat menyelesaikan program sarjana penulis.

Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritik sangat berguna bagi penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap bahwa penulis skripsi ini diharapkan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat umum maupun kalangan akademisi, terkhususnya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta



ABSTRACT

Public transportation is an important service. It is needed by the community in their daily activity. During the Covid-19 pandemic, according to Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, consumers are required to show a Covid-19 free letter through the results of a rapid test or PCR to use public transportation. The government has indeed set the highest rapid test cost of Rp. 150,000, but for poor consumers the fare is burdensome. This study aims to identify and conduct legal studies related to government policies in protecting poor consumers to get rapid test services in order to access public services and facilities. The type of the research is normative legal research. The research use literature study method by examining legal materials, both primary and secondary, for then descriptive analysis and legal synchronization were carried out. The results of this study indicate that for the poor, or poor consumers, the cost of the rapid test is not borne by BPJS nor given subsidies / assistance from the government. It can lead to discrimination where only wealthy people can access public transportation. Therefore, government affirmative action is needed towards the poor, or poor consumers, in terms of financing the Covid-19 rapid test and PCR test. Thus, discrimination can be avoided and the fulfillment of rights to health, right to life, and economic, social and cultural rights can go hand in hand.

Keywords: Covid-19, rapid test, poor consumer, public transportation



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data.....	14
BAB II: PEMBAHASAN	16
A. Perlindungan Konsumen	16
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	16
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	18
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	19
B. Konsumen Miskin	21
1. Pengertian Konsumen Miskin	21

C. Rapid Test Covid-19	23
D. Kebijakan Terkait Pandemi Covid-19.....	24
1. Peraturan dan Pedoman Penanganan Covid-19.....	24
E. Pedoman Hak Asasi Manusia dalam Masa Pandemi Covid-19	33
F. Tinjauan Hak Konsumen Miskin ntuk Mengakses Transportasi Publik.....	35
1. Tinjauan Hak Asasi Manusia atas Kehidupan yang layak	35
2. Tinjauan Hak Masyarakat atas Transportasi Publik	41
3. Tinjauan Kebijakan Pemerintahan Tentang Syarat Rapid Test	47
4. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Miskin Dalam mengakses Transportasi Publik di Era Pandemi Covid-19	56
BAB III: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

Daftar Tabel

- Tabel 1 : Kumpulan Peraturan Terkait Penanganan Covid-19
- Tabel 2 : Aturan-aturan Transportasi Publik dan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi Covid-19
- Tabel 3 : Aturan Syarat *Rapid Test* untuk Perjalanan Menggunakan Transportasi Publik.

Daftar Gambar

- Gambar 1 : Alur Kebijakan Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)



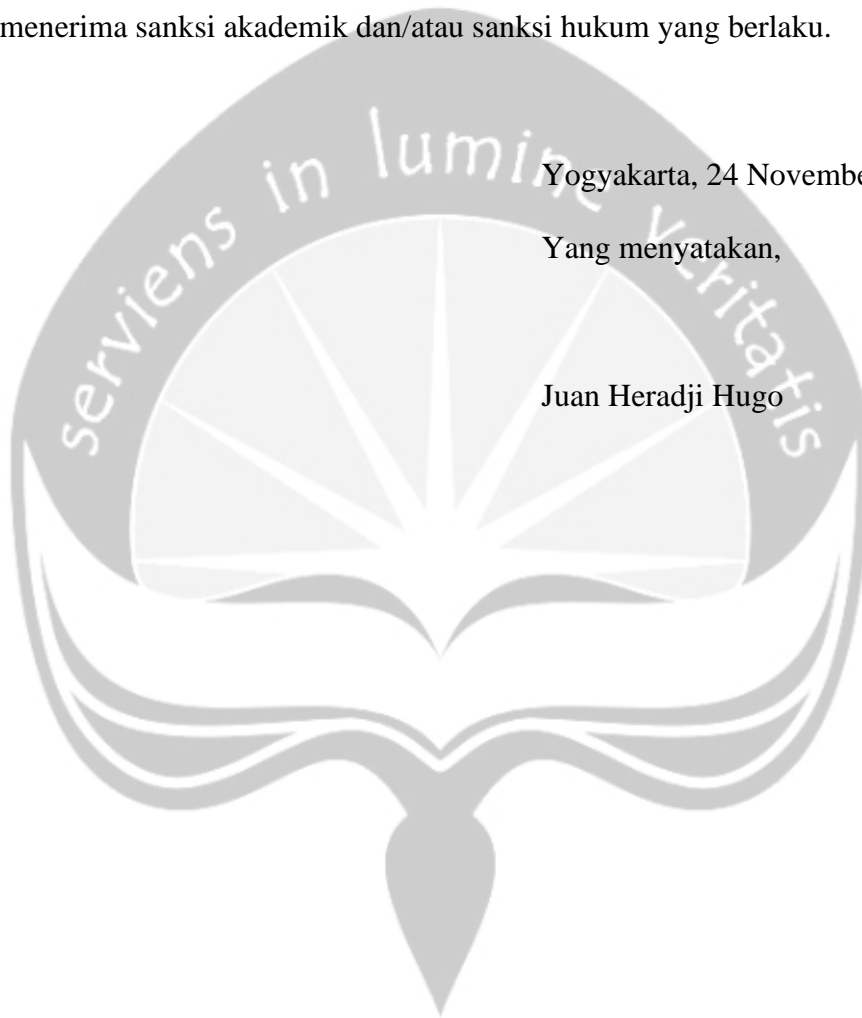
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2020

Yang menyatakan,

Juan Heradji Hugo



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Selain di China, sebagai titik awal sumber penyakit, muncul beberapa episentrum baru. Covid-19 menyebar secara cepat dan dalam skala yang luas sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Indonesia juga tidak dapat terlepas dari serangan virus mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 2 Maret 2020, Covid-19 terus menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Kondisi tersebut memaksa pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia.

Untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi *Covid-19*, pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* telah menetapkan 3 jenis tes yaitu : (1) Tes Cepat Molekuler (TCM), (2) *Polrymerase Chain Reaction* (PCR) atau swab test, dan (3) *Rapid Test*.¹ Test TCM biasa digunakan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis (TB) dengan berdasarkan pemeriksaan molekuler. Metode pemeriksaan *Covid-19* ini menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis *cartridge*. Tes ini terbilang cukup cepat karena hasilnya bisa diketahui dalam waktu kurang lebih dua jam. Untuk Tes PCR, atau swab test, digunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Metode pemeriksaan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasilnya karena melalui dua kali proses yaitu, ekstraksi dan amplifikasi. Sedangkan *rapid*

¹ Halodoc.com, 3 April 2020, “*Mengenal 3 Jenis Tes Corona yang Digunakan di Indonesia*”, dari <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-jenis-tes-corona-yang-digunakan-di-indonesia>, (diakses pada 13 September 2020)

test menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi *imunoglobulin*, yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. *Rapid test* bisa dilakukan di mana saja dan hasilnya dapat diketahui dalam waktu singkat, yakni sekitar 15-20 menit. Pada masa pandemi *Covid 19*, dalam kondisi kenormalan baru atau biasa disebut dengan (*new normal*), sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* No.9/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*). *Rapid test* menjadi persyaratan sebelum melakukan berbagai macam kegiatan, seperti perjalanan ke luar kota, perjalanan menggunakan moda transportasi masal seperti pesawat udara dan kereta api, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat berkumpul dan berinteraksi secara fisik. Bagi seseorang yang hasilnya non reaktif maka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, sedangkan bagi yang hasilnya reaktif maka akan di test kembali menggunakan *swab test*.

Kewajiban melakukan *rapid test* atau tes cepat dalam melakukan sejumlah aktivitas dalam masyarakat tersebut membutuhkan biaya serta tidak ditanggung oleh BPJS. ²Hal ini tentu memberatkan bagi masyarakat terutama lapisan masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang berdaya beli rendah, meskipun pemerintah melalui Surat Edaran Menkes Nomor HK.02.02/I/2875/2020 telah menetapkan tarif batas tertinggi *rapid test* sebesar Rp.150.000,-. Apalagi dalam kondisi pandemi *Covid-19* yang telah memberikan

² Kompas.com, 10 Juni 2020, “*Terindikasi Covid-19, Pasien BPJS Harus Bayar Rapid Test atau Tidak? Simak Penjelasannya...*”, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/10/180400965/terindikasi-covid-19-pasien-bpjs-harus-bayar-rapid-test-atau-tidak-simak?>, (diakses pada 15 September 2020)

dampak cukup besar bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi, termasuk peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi, yaitu ketika hanya orang mampu yang dapat melakukan aktivitas di ruang publik ataupun menggunakan fasilitas publik. Ujungnya adalah terjadinya pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana termuat dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, atau ICESCR) Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian tersebut berusaha menjamin, bahwa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun termasuk dalam hal kekayaan.

Masalah perlindungan konsumen sebagai isu *universal* yang telah dituangkan dalam *United Nations Guildlines for Customer Protection* tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong efisiensi ekonomi saja melainkan berkaitan dengan masalah keadilan sosial dan HAM,³ dalam dokumen UNGCP (*Unites Nations Guidelines for Consumer Protection*) disebutkan bahwa salah satu aspek perlindungan konsumen adalah tersedianya akses oleh konsumen terhadap barang dan jasa yang penting atau esensial. Dengan permasalahan yang terjadi penerapan protokol kesehatan yang mewajibkan syarat bebas Covid-19 melalui *rapid test* sebelum menggunakan fasilitas publik, akses terhadap barang dan jasa yang penting menjadi terhalangi, terutama bagi konsumen miskin yang tidak mampu membayar sejumlah biaya untuk *rapid test*. Salah satu contoh

³Johanes Widiyantoro, 2016, "Mewujudkan Perniagaan Berkeadilan Melalui Peningkatan Akses Keadilan Konsumen", *Jurnal Mimbar Hukum*, Terbitan 3/2012 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.445.

fasilitas publik yang mensyaratkan *rapid test* bagi penggunaannya adalah angkutan umum, seperti: pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19*, sebagai berikut:

“Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari, atau; Menunjukkan surat keterangan uji *Rapid test* dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.”

Angkutan umum adalah fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan termasuk dalam jasa yang penting. Salah satu jenisnya adalah kereta api. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Pasal 2, kereta api adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional dan diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, diantaranya adalah asas keadilan. Dalam masa pandemi *Covid-19* ini PT. KAI sebagai operator jasa angkutan kereta api di Indonesia mengikuti SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sehingga mensyaratkan konsumennya menunjukkan surat bebas *Covid-19* melalui hasil *rapid test* atau PCR.⁴ Dengan adanya kewajiban tersebut tentu akan membuat akses terhadap angkutan kereta api memberatkan bagi konsumen miskin. Melihat hal tersebut maka diperlukan kajian hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi konsumen miskin untuk mendapatkan layanan *rapid test Covid-19*, sehingga mereka tetap dapat mengakses fasilitas publik, yaitu angkutan kereta api, dengan sekaligus tetap

⁴ travel.kompas.com, 2 September 2020, “Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Saat New Normal”, dari <https://travel.kompas.com/read/2020/09/02/151000527/syarat-naik-kereta-api-jarak-jauh-saat-new-normal?page=all>, (diakses pada 15 September 2020)

mengikuti protokol kesehatan guna menjamin keselamatan dan kesehatan mereka.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen miskin untuk mendapatkan layanan *rapid test* sebagai syarat mengakses transportasi publik di era pandemi Covid-19?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait perlindungan terhadap konsumen miskin dalam mendapatkan layanan *rapid test* guna mengakses transportasi publik.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teroretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama terkait perlindungan terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu serta penegakan hak asasi manusia, ditinjau dari UUD 1945 dan semua perundang-undangan dan aturan-aturan di negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai kalangan, diantaranya

- a. Bagi Pemerintah Pusat dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait hak-hak masyarakat miskin dan kurang mampu dalam menghadapi pandemi *Covid-19*.
- b. Bagi peneliti dan kalangan akademis sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada masa mendatang.
- c. Bagi Mahasiswa agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menganalisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan *rapid test Covid-19*
- d. Bagi Masyarakat, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan *rapid test Covid-19*
- e. Bagi Penulis, agar dapat memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Kajian Hukum Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Layanan *Rapid Test Covid-19*. Judul penelitian ini merupakan karya asli, dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa penelitian lain yang dapat diperbandingkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ryan Setia Dwi Cahya, NPM: 115010107113001, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2015, judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri)”. Rumusan masalah, hasil, dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengemis di Kota Kediri dalam pemberian jaminan sosial ?
- 2) Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan hukum berupa jaminan sosial terhadap pengemis di Kota Kediri ?
- 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi pengemis untuk mendapatkan jaminan sosial?

b. Hasil penelitian:

Dinsosnaker Kota Kediri telah melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan masyarakat miskin terutama para pengemis. Pemerintah Kota Kediri dengan Dinsosnaker telah mengeluarkan berbagai program-program untuk membantu para pengemis dalam memberikan jaminan sosial. Didalam panti penampungan dinsosnaker telah memberikan berbagai fasilitas-fasilitas seperti para pengemis akan diberikan pembinaan dan diberikan bekal agar dapat merubah pola hidupnya menjadi lebih baik. Faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pengemis berupa jaminan sosial, Pada saat melakukan razia atau penertiban masih banyak pengemis yang memberontak atau pengemis melarikan diri, dan saat dimasukkan ke dalam barak penampungan pengemis terjadi overload dalam panti penampungan pengemis tersebut.

c. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan :

Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat golongan kurang mampu. Tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam hal konteks perlindungannya, yaitu penelitian tersebut membahas perlindungan masyarakat kurang mampu dalam hal mendapatkan jaminan sosial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas perlindungan masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan layanan *rapid test* Covid-19.

2. Tri Pamestri Pungkassangadji, NPM: 030516209, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2009, judul: “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Kesehatan (Studi Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2009)”. Rumusan masalah, hasil, dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Rumusan masalah:

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga miskin Surabaya yang tidak mendapatkan bantuan kesehatan menurut Perwali No. 16 Tahun 2009?

b. Hasil Penelitian:

Bentuk perlindungan hukum bagi warga miskin Surabaya yang tidak

mendapatkan bantuan kesehatan menurut Perwali No.16 Tahun 2009 tersebut ditujukan kepada warga masyarakat yang berkartu penduduk di Surabaya. Pelayanan kesehatan hanya untuk warga masyarakat yang beridentitas Surabaya adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, karena anggaran pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin tersebut diambilkan dari APBD Kota Surabaya. Perwali No. 16 Tahun 2009 mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 55 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana tercantum dalam Konsideran Bagian Mengingat Perwali No. 16 Tahun 2009.

c. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian tersebut sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal konteks layanan kesehatan yang dijadikan obyek penelitian bersifat umum, dan lingkup hukum dan pelayanan bersifat lokal hanya di Kota Surabaya. Sedangkan, lingkup hukum dan layanan kesehatan yang jadi obyek penelitian yang akan dilakukan peneliti berskala nasional.

3. Samudra, NPM: 12912109, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2014, judul: “Impelementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu dan Perlindungan Hukumnya”. Rumusan masalah, hasil, dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan hak kesehatan pasien tidak mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009?
- 2) Bagaimanakah sistem perlindungan hukum pasien tidak mampu terkait hak pasien, rumah sakit dan dokter?
- 3) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien tidak mampu apabila tidak dilayani rumah sakit?

b. Hasil penelitian:

- 1) Pelaksanaan pelayanan hak kesehatan pasien tidak mampu di RSUD Prambanan sudah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009.
- 2) Sistem perlindungan hukum bagi pasien tidak mampu yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, lengkap dan paripurna sesuai dengan standar kompetensi medis. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 3) Upaya hukum yang biasanya dilakukan oleh pasien tidak mampu apabila tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit adalah dengan mempertanyakan kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan dan melaporkan hal tersebut kepada anggota DPRD setempat.

c. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian tersebut sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan. Tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal konteks layanan kesehatan yang dijadikan obyek penelitian bersifat umum, dan lingkup hukum dan pelayanan bersifat lokal hanya di RSUD Prambanan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta. Sedangkan, lingkup hukum dan layanan kesehatan yang jadi obyek dari penelitian yang akan dilakukan peneliti bersifat khusus untuk layanan rapid test Covid-19 dan berskala nasional.

E. Batasan Konsep

1. Kajian hukum adalah kajian normatif yang memandang hukum sebagai sebuah kaidah untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Perlindungan adalah suatu perlindungan hukum untuk mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain atau situasi tertentu. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan maksud supaya mereka dapat memperoleh semua hak yang diberikan oleh hukum kepadanya.
3. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya.
4. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset .

5. *Rapid test* Covid-19 adalah merupakan langkah awal identifikasi apakah seseorang sedang terinfeksi virus, termasuk SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, menggunakan antibodi yang diambil dari sampel darah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian normatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta, dengan tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat

Sedangkan jika dilihat dari tujuannya maka jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁵ penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- normanya saja. Objek kajiannya meliputi Peraturan Undang-Undang . Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang paling sesuai untuk dipakai dalam penelitian ini. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah,

⁵ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar.Yogyakarta. hlm 34

yaitu perlindungan terhadap konsumen miskin dalam mendapatkan layanan *rapid test* guna mengakses layanan dan fasilitas publik, yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang dibuat oleh presiden maupun jajaran dibawahnya, seperti peraturan pemerintah, kepres, inpres, dan permen. Dalam mengeluarkan aturan-aturan tersebut pemerintah harus merujuk pada aturan-aturan yang berada di atasnya, yaitu aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu studi yang dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, prosiding, dan karya ilmiah lainnya baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat miskin atas akses pelayanan *rapid test* Covid-19.

3. Analisis Data

Analisis terhadap data-data hukum primer akan dilakukan dalam lima macam tindakan, yaitu:

- a. Mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik isi maupun struktur, tentang perlindungan terhadap hak masyarakat miskin atas akses pelayanan *rapid test* Covid-19
- b. Melakukan sinkronisasi hukum, baik secara vertikal dengan UUD '45 dan peraturan-peraturan dibawahnya, maupun secara horizontal dengan peraturan yang setingkat.

- c. Melakukan interpretasi terhadap data-data hukum primer.
- d. Manilai peraturan-peraturan sesuai dengan hukum primer.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dikutip dari media masa dan karya ilmiah yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan dianalisis untuk kemudian dibandingkan dengan hasil kajian terhadap data-data hukum primer.



BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19. Presiden telah mengeluarkan Keppres No. 7/2020, Keppres No. 9/2020, PP No. 21/2020, Keppres No. 12/2020, Inpers No. 6/2020, dan PP No. 99/2020. Kebijakan terkait dengan penggunaan transportasi publik di era pandemi Covid-19 diatur melalui Permenhub dan Surat Edaran dari Gugus Tugas Covid-19 yang pelaksanaannya diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa untuk mengakses transportasi publik, baik darat, laut, udara maupun kereta api, calon penumpang wajib untuk menunjukkan surat keterangan uji *test PCR* dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Sedangkan untuk melakukan *Rapid Test* calon penumpang dikenai biaya maksimal Rp. 150.000 sesuai dengan Surat Edaran Menkes No. HK.02.02/I/2875/2020.

Bagi golongan masyarakat miskin, atau konsumen miskin, biaya *Rapid Test* tidak ditanggung oleh BPJS ataupun diberi subsidi/bantuan dari pemerintah. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya diskriminasi dimana hanya orang yang mampu saja yang bisa mengakses layanan transportasi publik. Untuk itu diperlukan tindakan afirmatif dari pemerintah terhadap golongan masyarakat miskin, atau konsumen miskin, dalam hal pembiayaan *rapid test* Covid-19 maupun *test PCR*. Tindakan afirmatif yang

dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dapat berupa pemberian subsidi hingga penggratisan biaya *rapid tets* ataupun *test PCR*. Dengan demikian maka diskriminasi dapat dihindari dan pemenuhan hak kesehatan, hak hidup, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat berjalan beriringan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak atas kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 harus dilakukan tanpa mengabaikan pemenuhan hak asasi ekonomi, sosial dan budaya.
2. Tidak boleh ada diskriminasi dalam memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya dalam mengakses transportasi publik di era pandemi Covid-19.
3. Tindakan afirmatif terhadap masyarakat golongan miskin, atau konsumen miskin, dalam hal pembiayaan *Rapid Test* dan/atau *Test PCR* sebagai syarat untuk mengakses transportasi publik, harus dilakukan untuk menghindari diskriminasi. Tindakan afirmatif tersebut dapat berbentuk bantuan subsidi ataupun penggratisan biaya
4. Pemerintah perlu membuat aturan khusus untuk mengatur tindakan afirmatif terhadap masyarakat golongan miskin atau konsumen miskin baik berbentuk bantuan subsidi ataupun penggratisan biaya *rapid test* dan/atau tes *PCR*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Rustanto, 2014, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*, STKSPRESS, Bandung
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta: Bandung
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2020, *Pedoman Hak Asasi Manusia di Tengah Pandemi Covid-19, Covid-19 Guidance*, The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Geneva, Switzerland
- Utin Kiswanti & Dinar Dana Kharisma, (ed.), 2014, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta
- Vivi Yulaswati, (ed.), 2018, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*, Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta
- Suwandono, Agus and Dajaan, Susilawati S, 201, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Deni Bram, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Smith, R.K.M. et.al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Nugroho, S.P & Haq, H.S. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Terhadap Penumpang Transportasi Udara)*. Navida: Boyolalli
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Undang-Undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea 4

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (3)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (2)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I Ayat (2)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849. Sekretariat Negara. Jakarta

UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956. Sekretariat negara. Jakarta.

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Jurnal

Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Thariq R.M., Wahyu, M.F.R, Ningrum, D.R., dan Aidha C.N., 2020,

Kemiskinan Multidimensi dan Risiko Covid-19 di Indonesia, *Working Paper*, No.1, PRAKARSA

Daniel, J.R., 2017, Kerentanan Konsumen: Landasan Konseptual dan Refleksi bagi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Makalah Diskusi KRKK No. 01*

Johanes Widijantoro, 2016, Mewujudkan Perniagaan Berkeadilan Melalui Peningkatan Akses Keadilan Konsumen, *Jurnal Mimbar Hukum*, Terbitan 3/2012 *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, hlm.445.

Kemenkumham. 2017. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Transportasi Umum Massal*. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham

Perjanjian Internasional

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Skripsi/Tesis

Ryan Setia Dwi Cahya, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Samudra, 2014, *Implemementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu dan Perlindungan Hukumnya*, Tesis: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Tri Pamestri Pungkassangadji, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Kesehatan (Studi Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2009)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Internet

Halodoc.com, 3 April 2020, “*Mengenal 3 Jenis Tes Corona yang Digunakan di*

Indonesia”, dan <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-jenis-tes-corona-yang-digunakan-di-indonesia>, (diakses pada 13 September 2020)

Kompas.com, 10 Juni 2020, “Terindikasi Covid-19, Pasien BPJS Harus Bayar *Rapid Test* atau Tidak? Simak Penjelasannya...”, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/10/180400965/terindikasi-covid-19-pasien-bpjs-harus-bayar-rapid-test-atau-tidak-simak?>, (diakses pada 15 September 2020)

travel.kompas.com, 2 September 2020, “Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Saat New Normal”, dari <https://travel.kompas.com/read/2020/09/02/151000527/syarat-naik-kereta-api-jarak-jauh-saat-new-normal?page=all>, (diakses pada 15 September 2020)

Republika.co.id., 8 Juli 2020, “*Standardisasi Harga Rapid Test Saja Tidak Cukup*”, dari <https://republika.co.id/berita/qd5g9e328/standardisasi-harga-emrapid-testem-saja-tidak-cukup>, (diakses pada 21 Oktober 2020)

Biskom.web.id, 28 Mei 2020, “*Hak Hidup vs Hak Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19*”, dari <http://www.biskom.web.id/2020/05/28/hak-hidup-vs-hak-ekonomi-di-masa-pandemik-covid-19.bwi>, (diakses pada 21 Oktober 2020)

Republika.co.id, 10 Juli 2020: “Biaya *Rapid test* masih dinilai terlalu mahal” <https://republika.co.id/berita/qd7pki6725000/biaya-emrapid-testem-dinilai-masih-mahal> (diakses pada tanggal 25 November)

Jawapos.com, 7 Agustus 2020, *BPJS Kesehatan Pastikan Tak Tanggung Biaya Rapid dan Swab Test*, dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/08/07/207987/bpjs-kesehatan-pastikan-tak-tanggung-biaya-rapid-dan-swab-test>, (diakses pada 26 Desember 2020)

Kabarselebes.id, 11 Juni 2020, “*Sulteng Bergerak Sebut Rapid Test Berbayar Bentuk Diskriminasi Warga Miskin*”, dari <https://www.kabarselebes.id/berita/2020/06/11/sulteng-bergerak-sebut-rapid-test-berbayar-bentuk-diskriminasi-warga-miskin/>, (diakses pada 26 Desember 2020)

Jawapos.com, 7 Agustus 2020, *BPJS Kesehatan Pastikan Tak Tanggung Biaya Rapid dan Swab Test*, dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/08/07/207987/bpjs-kesehatan-pastikan-tak-tanggung-biaya-rapid-dan-swab-test>, (diakses pada 26 Desember 2020)

